

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa pada kerangka otonomi daerah tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat dan juga pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan ekonomi, sarana prasarana, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan (Handraini dkk., 2024) Tujuan dari pembangunan di wilayah pedesaan adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan infrastruktur. Desa memiliki posisi strategis sebagai pelopor pembangunan nasional, sekaligus sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta menjamin kehidupan demokratis dan kualitas pelayanan publik demi keutuhan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hidayatulloh & Yani, 2021)

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap peran desa, muncul kesadaran bahwa desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, menekan ketimpangan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat hampir setengah dari total penduduk Indonesia sekitar 49% berdomisili di wilayah pedesaan (Firmansyah dkk., 2024). Oleh karena

itu, penguatan kapasitas desa menjadi kunci dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari penguatan kapasitas tersebut adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa melalui otonomi. Otonomi desa berarti desa memiliki kemampuan untuk berinisiatif dan berkreasi dalam mengelola pemerintahannya sendiri, serta mendorong tumbuhnya demokrasi di tengah masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, desa atau wilayah setingkat desa memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan tanpa harus terbebani oleh program-program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat (Kaunang & Sumampouw, 2019)

Keleluasaan ini diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola desa di Indonesia. Melalui regulasi ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu implementasi dari penguatan otonomi desa tersebut adalah penyaluran Dana Desa (DD) sejak tahun 2015, yang bertujuan mendukung percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemandirian ekonomi desa. Selain Dana Desa, pemerintah juga mendorong desa untuk mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) secara mandiri, yang diperkuat dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen ekonomi lokal. Mayoritas masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Namun, desa juga memiliki potensi besar lainnya seperti sumber daya alam dan

nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan, seperti pariwisata berbasis desa. Dengan kewenangan yang lebih besar dan dukungan anggaran yang memadai, desa kini diposisikan sebagai subjek utama pembangunan nasional, yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi lokal secara maksimal guna menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. (Diajeng Putri Yanuardani & Lukman Arif, 2022)

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa adalah satuan wilayah terendah. Melalui Undang-Undang Desa, desa diharapkan mampu berdiri sendiri dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pemerintah memberi perhatian besar untuk memperkuat desa agar mampu bersaing secara global. Sebagai garda terdepan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, desa didorong untuk menjadi lebih mandiri melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sebuah entitas ekonomi yang dijalankan secara kolaboratif oleh masyarakat dan aparat desa. BUMDes berperan sebagai lembaga sosial dan unit usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa (Fitriyanti, 2019.). Pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat melalui BUMDes mendorong kemandirian dan penguatan ekonomi desa. Sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2010, BUMDes didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan pengelolaan dan kepemilikan modal secara bersama. BUMDes menjadi wadah kerja sama pemerintah desa dan warga untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa, BUMDes beroperasi secara kooperatif, partisipatif, dan transparan, serta didukung lembaga keuangan desa. Dengan manajemen yang baik, BUMDes diharapkan

mampu mengatasi masalah ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata.

Salah satu daerah yang menunjukkan dinamika perkembangan BUMDes yang cukup signifikan adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah Provinsi terbesar di Pulau Jawa, yang dihuni oleh 41.416.407 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 3,5%. Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten secara administratif, meliputi 9 kota, 666 kecamatan, dan 8501 desa/kelurahan. Dengan jumlah desa yang begitu banyak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berupaya menjadikan desa sebagai tumpuan peningkatan perekonomian. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan dan pertumbuhan BUMDes. Pada tahun 2023 jumlah desa mandiri di Jawa Timur adalah sebanyak 2.800 desa dan pada 2024 menjadi 4019 desa. Peningkatan 1.219 desa mandiri atau 43,54% dalam setahun ini turut menurunkan angka kemiskinan di Jatim mencapai 9,79% pada Maret 2024. Program pemberdayaan masyarakat desa ini dilakukan dengan cara menumbuhkan BUMDes yang saat ini jumlahnya mencapai total 6.582 BUMDes dengan 1.400 BUMDes di antaranya terkategori maju (Wahyudinata 2024)

Akan tetapi, tidak semua desa di Provinsi Jawa Timur memiliki BUMDes yang benar-benar berhasil dikembangkan serta dimanfaatkan bagi keperluan desa secara maksimal. Hal ini menjadi penegas bahwa sebenarnya tidak mudah untuk mengembangkan BUMDes. Kabupaten Gresik terkait dengan Data Indeks Desa Membangun terdapat 290 Desa Mandiri dan 40 Desa Maju Komisi I DPRD Gresik

memberikan pernyataan kondisi riil lapangan yang tertulis dalam [portalgresik.id](http://portalgresik.id) (2024) bahwa:

“Data yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Terdapat kesenjangan antara data yang tercatat dengan situasi yang sebenarnya di Kabupaten Gresik, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara informasi yang ada dan kondisi riil masyarakat. Salah satu topik utama yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah kinerja BUMDes yang dianggap belum optimal. Menurut Rizaldi, banyak BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang belum mampu mengelola potensi ekonomi desa dengan efektif. 'BUMDes seharusnya menjadi pendorong utama ekonomi desa, tetapi banyak yang belum memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal,' ujarnya. Rizaldi juga menambahkan bahwa sektor-sektor potensial di desa masih belum dikelola secara profesional oleh BUMDes. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Komisi I DPRD Gresik, mengingat desa-desa menerima alokasi dana setiap tahunnya, yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan BUMDes. Namun, hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi harapan.” (Portalgresik.id, 2024).

Salah satu kawasan yang mencerminkan dinamika tersebut adalah wilayah Gresik bagian selatan. Wilayah ini cenderung terdiri dari desa-desa agraris yang letaknya relatif jauh dari pusat kota, dengan tingkat pembangunan infrastruktur dan akses layanan publik yang belum sekuat wilayah utara. Menurut dokumen RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026, pemerataan pembangunan antarwilayah merupakan isu strategis yang menjadi fokus utama, terutama terkait ketimpangan antara kawasan utara yang lebih maju secara industri dan kawasan selatan yang masih didominasi sektor agraris. Seperti pada penjelesan dari Komisi 1 DPRD Gresik bahwa terdapat ketimpangan data antara BUMDes maju dan BUMDes berkembang

di kabupaten Gresik yang mana masih kurang optimalnya kinerja BUMDes. Berikut terdapat data pada Gresik bagian Selatan:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi BUMDes Gresik Selatan Tahun 2023**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Klasifikasi
1.	Gresik	Cerme	Wedani	Sumber Makmur	Maju
2.	Gresik	Cerme	Dadapkuning	Bina Sejahtera	Maju
3.	Gresik	Cerme	Banjarsari	Banjarsari	Maju
4.	Gresik	Balongpanggang	Balongpanggang	Jaya Abadi	Maju
5.	Gresik	Balongpanggang	Bandungsekaran	Sumber Barokah	Berkembang
6.	Gresik	Benjeng	Metatu	Jaya Makmur	Pemula
7.	Gresik	Menganti	Gadingwatu	Gading Makmur	Berkembang
8.	Gresik	Menganti	Hendrosari	Lontar Sewu	Maju
9.	Gresik	Menganti	Kepatihan	Gotong Royong	Pemula
10.	Gresik	Menganti	Palemwatu	Mandiri Palemwatu	Maju
11.	Gresik	Menganti	Randupadangan	Barokah Sejahtera	Pemula
12.	Gresik	Menganti	Sidojangkung	Makmur Sidojangkung	Maju
13.	Gresik	Menganti	Gempolkurung	Bina Mandiri	Berkembang
14.	Gresik	Menganti	Sidowungu	Bangun Bersama	Berkembang
15.	Gresik	Menganti	Pranti	Cipta Luhur	Berkembang

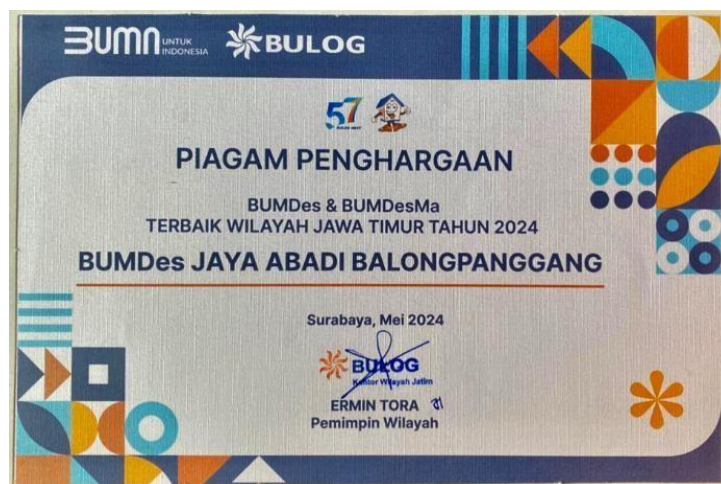
No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Klasifikasi
16.	Gresik	Menganti	Laban	Sejahtera	Berkembang
17.	Gresik	Wringinanom	Kedunganyar	Anugrah	Berkembang
18.	Gresik	Wringinanom	Pedagangan	Sri Rejeki	Berkembang

Sumber : Data BUMDes Desa Balongpanggang, Tahun 2025

Di tengah kondisi tersebut, Desa Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama BUMDes Jaya Abadi pada tahun 2016. Pendirian BUMDes ini diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Balongpanggang No. 12 Tahun 2021. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Potensi dari Desa Balongpanggang yakni di antaranya adalah Pasar Desa, pada tahun 2017 Pasar Desa Balongpanggang yang dikelola oleh BUMDes Jaya Abadi mendapatkan penghargaan kategori Pasar Desa terbaik Se- Jawa Timur. Hal tersebut sesuai pernyataan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tursilowanto Hariogi kepada Kabag Humas Pemkab Gresik yang tertulis dalam website resmi Desa Balongpanggang [desabalongpanggang.gresikkab.go.id](http://desabalongpanggang.gresikkab.go.id) (2023):

“Pasar Desa Balongpanggang memperoleh penghargaan berkat keunggulannya dalam hal penataan dan pengelolaan. Meski dibangun secara sederhana oleh Dinas Pekerjaan Umum, tata letaknya tertata rapi dan sistematis. Saluran drainase tersusun dengan baik, dan kebersihan di setiap blok tetap terjaga. Tursilo menambahkan, meskipun terdapat ratusan kios, seluruh area pasar tampak tertata dengan kios yang dikelompokkan sesuai jenis barang dagangan. Pengelolaan pasar pun berjalan efektif, mengikuti pedoman yang berlaku, didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan pelaksanaan tugas yang dijalankan sesuai peran masing- masing pihak ([desabalongpanggang.gresikkab.go.id](http://desabalongpanggang.gresikkab.go.id), 2023)”.

Dalam pernyataan di atas disimpulkan bahwa penataan serta pengelolaan Pasar Desa di Balongpanggang bagus sesuai dengan arahan yang ada. Selain mendapat penghargaan pasar desa terbaik BUMDes Jaya Abadi juga banyak memperoleh penghargaan di tahun-tahun setelahnya. Seperti Top 5 BUMDes Terbaik se- Kabupaten Gresik



**Gambar 1.1 Piagam Penghargaan BUMDes Jaya Abadi**

Sumber: Data BUMDes Jaya Abadi, 2025

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa BUMDes terbaik 2 pada program lumbung pangan Jawa Timur dan juara 2 terbaik se Jawa Timur oleh Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur dalam memperingati hari Ulang Tahun (HUT) Perum ke- 57 BULOG. Berbagai penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa BUMDes Jaya Abadi layak dikategorikan sebagai BUMDes maju. Balongpanggang sendiri BUMDes yang maju masih tergolong belum banyak. BUMDes ini memiliki 9 (Sembilan) unit usaha di antaranya:



**Tabel 1.2 Unit Usaha Desa Balongpanggang**

<b>No.</b>	<b>Unit Usaha</b>
1.	Unit Pasar Tradisional
2.	Unit Pasar Sapi
3.	Unit Pasar Ayam
4.	Unit Pasar Sayur
5.	Unit Terminal Lyn
6.	Unit Persewaan Ruko
7.	Unit Retribusi Sampah
8.	Unit Grosir Sembako
9.	Unit Jasa Pembayaran

Sumber : Data BUMDes Jaya Abadi, tahun 2025

Namun sebelum peran BUMDes Jaya Abadi berkembang seperti saat ini, kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Balongpanggang masih menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas ekonomi masyarakat berjalan secara individual, belum terorganisir dalam kelembagaan desa, dan belum mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan. Sebagian pelaku usaha desa masih mengalami keterbatasan dalam keterampilan produksi, pemasaran, serta legalitas usaha. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa relatif rendah, karena masyarakat cenderung menunggu hasil nyata sebelum bersedia terlibat aktif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi desa dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap unit usaha desa. Dalam manajemen BUMDes “Jaya Abadi” memberikan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Desa Balongpanggang. Menurut hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Jaya

Abadi diperoleh informasi bahwa telah diadakan beberapa pelatihan, yang meliputi : 1) Pelatihan batik balongkemisan 2) Pelatihan Haskar Desa (Hasta Karya Desa Balongpanggang) 3) Pelatihan UMKM Selain itu juga BUMDes Jaya Abadi menaungi pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang diproduksi sendiri oleh masyarakat desa balongpanggang yakni keripik brownis, jamu, kue pie dan batik kemisan. BUMDes Jaya Abadi mengadakan sosialisasi pada tahun 2018 dan UMKM BUMDes Jaya Abadi masih memproduksi hingga saat ini, terdapat produk UMKM baru di Desa Balongpanggang ini yakni produk batik kemisan yang mana menunjukkan bahwa adanya proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Balongpanggang. Dalam Upaya pengembangan desa, Desa Balongpanggang menciptakan inovasi motif batik khas Desa Balongpanggang yang akan dijual ke luar desa yang dikelola oleh BUMDes Jaya Abadi dalam segi branding serta pemasaran produk lokal. BUMDes ini tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembinaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan usaha masyarakat, pengembangan kelembagaan, serta kepedulian terhadap lingkungan desa.

Seiring perkembangannya, BUMDes Jaya Abadi menunjukkan kinerja yang cukup baik melalui berbagai unit usaha dan program pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan UMKM, pengembangan produk lokal, serta inisiatif pengelolaan lingkungan melalui bank sampah. Meskipun demikian, keberhasilan BUMDes tidak hanya dapat diukur dari aspek finansial, melainkan dari sejauh mana BUMDes mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam perjalanannya, BUMDes Jaya Abadi juga menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pandemi COVID-19 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada tahun 2022 berdampak signifikan terhadap aktivitas perdagangan hewan ternak, yang menyebabkan penurunan kinerja beberapa unit usaha serta penutupan sementara pasar hewan di wilayah Balongpanggang. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya persaingan perdagangan daring turut mempengaruhi aktivitas ekonomi di pasar tradisional desa, yang berdampak pada penurunan tingkat okupansi ruko dan berimplikasi pada setoran BUMDes ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Pembentukan BUMDes dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. (Indrastuti & Ash-shidiqqi, 2022). BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa yang lebih maksimal dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, di Desa Balongpanggang, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh pemerintah atau BUMDes cenderung rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sikap masyarakat yang cenderung tidak mau terlibat jika belum melihat hasil yang nyata dari kegiatan tersebut.

Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih untuk tidak berpartisipasi aktif karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat langsung atau hasil yang signifikan dalam waktu singkat. Berikut diperoleh pernyataan dari sekretaris BUMDes ibu yayuk :

“namanya orang desa ya mbak kalau belum kelihatan hasil itu nggamau tapi kalau hasilnya sudah kelihatan baru partisipasinya kelihatan, susah diajak babat alas dulu.” (Yayuk, Wawancara Pra-penelitian 20 Oktober 2024)

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas yang ada, di mana masyarakat mengharapkan keuntungan atau dampak positif yang lebih cepat terlihat sebagai bentuk imbal balik dari partisipasi mereka. Sikap semacam ini menggambarkan tantangan dalam membangun kepercayaan dan pemahaman jangka panjang tentang pentingnya partisipasi dalam keberlangsungan dan kemajuan unit usaha tersebut. Berikut merupakan data omzet pendapatan BUMDes Jaya Abadi per tahun :

**Tabel 1.3 Setoran BUMDes ke PAD Balongpanggang**

No.	Tahun	Setoran BUMDes
1.	2021	Rp 208.367.000
2.	2022	Rp 767.964.000
3.	2023	Rp 816.215.000
4.	2024	Rp 985.251.000

Sumber : Data BUMDes Jaya Abadi, tahun 2025

Berdasarkan data setoran BUMDes ke PAD Desa Balongpanggang, terlihat adanya tren peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut belum merata di seluruh unit usaha. Beberapa unit usaha masih menunjukkan kinerja yang fluktuatif, sehingga peningkatan pendapatan secara agregat belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Data di atas bisa disimpulkan bahwa pendapatan BUMDes mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan Rp 126.567.000 juta rupiah angka yang cukup tinggi. Dan

mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya yakni seperti pada tahun 2023 sebesar Rp 985.251.000. Meski demikian, peningkatan tersebut tidak merata di seluruh unit usaha. Selain itu ada beberapa unit usaha yang mengalami penurunan dalam setoran ke PAD (Pendapatan Asli Desa).

Salah satu unit usaha yang patut mendapat perhatian adalah pasar desa yang dikelola oleh BUMDes. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi pasar tersebut masih belum mengalami perbaikan infrastruktur yang memadai. Atap sejumlah kios masih menggunakan kain atau terpal seadanya, dan sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan genangan bahkan banjir saat musim hujan. Padahal, keluhan mengenai kondisi ini telah muncul sejak satu hingga dua tahun sebelumnya melalui ulasan masyarakat di media publik seperti *Google Review*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan BUMDes belum sepenuhnya dibarengi dengan perbaikan layanan dan infrastruktur, khususnya pada unit-unit usaha yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa.



**Gambar 1.2 Infrastruktur Pasar Desa: Penutup Kios dan Selokan**

Sumber : dokumentasi penulis, 2025

Hal ini semakin diperburuk dengan ulasan-ulasan negatif yang muncul di platform seperti Google, di mana beberapa unit usaha BUMDes mendapat kritik tajam dari masyarakat. Ulasan-ulasan tersebut menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam, dengan banyak pengguna mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Beberapa bahkan menganggap kritik semacam ini mencerminkan adanya jurang komunikasi antara pengelola dan masyarakat, di mana ekspektasi yang tinggi tidak diimbangi dengan pencapaian yang dirasakan. Ini tentu saja semakin memperburuk tantangan dalam membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan usaha yang dikelola oleh BUMDes.



**Gambar 1.3 Ulasan Google Review**

Sumber : Google Review [https://maps.app.goo.gl/xQ4XvjC3jyENsq5aA?g\\_st=ic](https://maps.app.goo.gl/xQ4XvjC3jyENsq5aA?g_st=ic)  
(diakses 18 November 2024)

Maka dari itu, BUMDes diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi desa secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah desa juga dituntut untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan kelembagaan BUMDes agar lebih profesional. Meskipun BUMDes Jaya Abadi di Desa Balongpanggang telah menunjukkan

kinerja kelembagaan yang baik, termasuk melalui capaian unit usaha dan penghargaan sebagai Top 5 BUMDes di Kabupaten Gresik, belum ada kajian yang secara khusus menilai sejauh mana lembaga ini menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan kelembagaan tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat, baik dari aspek peningkatan kapasitas, keterlibatan warga, maupun keberlanjutan dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana BUMDes Jaya Abadi berperan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat desa bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial, kelembagaan, dan kemandirian warga. Penelitian ini menjadi relevan karena dapat menggambarkan praktik nyata pemberdayaan masyarakat di desa yang sudah relatif berkembang, sekaligus menjadi referensi model penguatan BUMDes berbasis pemberdayaan. Pemilihan fokus pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini didasarkan pada keyakinan bahwa keberhasilan BUMDes tidak cukup diukur dari aspek finansial semata, tetapi dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana praktik pemberdayaan masyarakat dijalankan oleh BUMDes, khususnya BUMDes Jaya Abadi di Desa Balongpanggang, sebagai representasi dari desa dengan potensi kelembagaan yang cukup berkembang di wilayah Gresik Selatan. (Gintara et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah pada keberhasilan pengelolaan BUMDes Jaya Abadi sebagai representasi BUMDes maju di Kabupaten Gresik. Oleh sebab itu dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat melalui BUMDes Jaya Abadi Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Abadi di Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik? ”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Abadi di Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang telah dijelaskan, lalu dapat diuraikan manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Abadi, khususnya dalam konteks pengelolaan ekonomi lokal dan pembangunan desa.



2. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori- teori pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan sumber daya lokal.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang Administrasi Publik khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes
2. Manfaat bagi pihak Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa Balongpanggang adalah penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Jaya Abadi.
3. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan BUMDes.